

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(PERUBAHAN RENJA 2022)**



KABUPATEN FLORES TIMUR

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4 Sistematika Tujuan..... | 5 |
| BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN..... | 5 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangka Daerah..... | 7 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 7 |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Perangkat Daerah..... | 8 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah..... | 9 |
| BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 10 |
| BAB IV PENUTUP..... | 11 |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan penyertaanNya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat disusun.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan dokumen Perubahan RKPD dengan mempertimbangkan evaluasi dari capaian target kinerja yang diperoleh sampai dengan triwulan II.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian dokumen Perubahan Renja ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karenanya kritikan dan saran masukan demi penyempurnaan untuk penyusunan dan penyajian dokumen yang sama pada tahun-tahun yang akan datang.

Semoga Perubahan Rencana Kerja DPPKBPPPA Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh DPPKBPPPA Kabupaten Flores Timur.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur



SRI ARDI RAHAJU, S.Sos, MAP

Pembina-TK, I

NIP. 19691016 199903 2 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah di susun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan. Secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022.

Perubahan Renja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempurnaan perencanaan pada unit organisasi pemerintah terrendah dan terkecil untuk memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya.

Perubahan Rencana Kerja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 disusun sebagai bahan acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan - permasalahan

yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Perubahan mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2022;
- b. Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur Tahun 2022 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur Tahun 2022 memuat penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan/sub kegiatan, serta kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores

Timur;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tiimur Tahun 2022 dan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur Tahun 2022.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur Tahun 2022 Tahun 2022 Kabupaten Flores Timur adalah :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan perubahan dari RKPD Tahun 2022 yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur Tahun 2022

- b. Untuk merumuskan Program dan Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur selama Tahun 2022.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Timur Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum penyusunan perubahan renja dan menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan Perubahan Renja DP2KBP3A,

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Menjelaskan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dan perkiraan capaian Tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan dan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan, capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra Perangkat Daerah, tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan hasil penelaahan terhadap Rancangan Awal Perubahan Renja dengan hasil analisis kebutuhan pada Perangkat Daerah.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Triwulan II

Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program Prioritas Utama (PU) dan Program Pendukung Prioritas (PP) pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2022, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan tahun terakhir periode RPJMD tahun 2017-2022. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja PD mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan pada pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada DP2KBP3A masih rendah,, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan sistem pelaksanaan kegiatan yang pada saat sekarang dilaksanakan langsung oleh petugas lapangan. Hasil evaluasi PD DP2KBP3A Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Lampiran 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa tingkat keberhasilan dan kegiatan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program- program. Pencapaian kinerja PD DP2KBP3A Kab. Flores Timur. Gambaran kinerja PD DP2KBP3A sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Triwulan II

Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program Prioritas Utama (PU) dan Program Pendukung Prioritas (PP) pembangunan Kabupaten Flores Timur tahun 2022, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok arah kebijakan tahun terakhir periode RPJMD tahun 2017-2022. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Evaluasi pelaksanaan Renja PD mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan pada pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada DP2KBP3A masih rendah,, hal ini dikarenakan terjadinya perubahan sistem pelaksanaan kegiatan yang pada saat sekarang dilaksanakan langsung oleh petugas lapangan. Hasil evaluasi PD DP2KBP3A Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Lampiran 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisa tingkat keberhasilan dan kegiatan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapain sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program- program. Pencapaian kinerja PD DP2KBP3A Kab. Flores Timur. Gambaran kinerja PD DP2KBP3A sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TARGET KINERJA | REALISASI TARGET KINERJA TW II TAHUN 2022 |
|---|---|----------------|---|
| Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%) | 100 | 67% (30.822 Orang) |
| | Cakupan Akseptor Baru (%) | 100 | 18.96% (1116 Orang) |
| | Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK) | 100 | 22 Kelompok |
| Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%) | 20% | 13 Orang |
| | Jumlah Lembaga Perempuan yang terbina | 19 | 0 |
| | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 100 | 97% (61.642 Orang) |
| Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Jumlah Lembaga Anak yang terbina (Lembaga) | 19 | 12 Lembaga Anak |

Dari Tabel yang ada menunjukkan bahwa hampir semua program belum mencapai hasil optimal, dengan demikian maka pada sisa waktu tahun 2022 di upayakan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA, didasarkan pada indikator kinerja daerah dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPPKBPPPA. Berdasarkan indikator kinerja dan kondisi permasalahan yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi pria (suami) dalam program KB
2. Minimnya tenaga penyuluhan KB dengan dasar keilmuan di bidang kesehatan reproduksi dan KB
3. Kurangnya dukungan lintas sektor dalam program KB
4. Penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dan anak dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadahi.
5. Penerapan Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundangan, kelembagaan dan kebijakan anggaran belum optimal.
6. Fasilitas sarana prasarana publik yang responsif gender belum tersedia secara memadahi.

Selain itu salah satu isu yang mengemuka berdasarkan amanat Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Kepala BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Sekretariat dalam upaya percepatan penurunan stunting daerah.

2.4 Review Terhadap Perubahan Renja

Review atau telaah terhadap rancangan perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur terdapat perubahan pendanaan pada program dan kegiatan. Perubahan program kegiatan dan pendanaan tersebut terdapat pada Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Renja 2022 sebesar Rp. 3.795.520.000 dan setelah perubahan RKPD 2022 menjadi Rp. 3.459.242.120. Perubahan pendanaan tersebut mengalami penurunan dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak diakomodir namun pada beberapa kegiatan pada program tersebut terdapat kenaikan pendanaan.

BAB III**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Pada Perubahan Renja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 memuat 6 Program, 14 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp 11.676.123.785, adapun perubahan anggrana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Membayai 1 Program, 5 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan anggrana sebesar Rp. 3.459.242.120
2. Program- program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - Program Pembinaan keluarga Berencana
 - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluaraga SejahteraMembayai 2 Program, 4 Kegiatan dan 9 Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.8056.881.665. Pada program Pembinaan Keluarga Berencana terdapat pembiayaan kegiatan dari dana DAK Fisik dan Non Fisik.
3. Program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak terdiri dari:
 - Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan Perempuan
 - Program Perlindungan Perempuan
 - Program Pengelolaan Sistem Data dan Gender dan Anak
 - Program Pemenuhan Hak AnakMembayai 4 Program, 5 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.160.000.000. Adapun rincian program/ kegiatan dan pendanaan perubahan renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada Lampiran 3.

**BAB V
PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur tahun 2022 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan. Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang di inginkan akan tercapai demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2022. Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur



Sri Ardi Rahaju, S.Sos, MAP

Pembina TK.I
NIP. 19691016 199903 2 007

LAMPIRAN 2.1 EVALUASI RENJA TRIWULAN II

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan | | | | | Indikator Program/ Kegiatan (Satuan) | Target RPJMD pada tahun 2017 s/d 2022 (akhir periode RENTRA) | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu (2021) | | Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2022 (Tahun Berjalan yang di Evaluasi) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun 2022 yang Dilegalisasi | Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun 2022 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RENTRA s/d Tahun 2022 (Akhir tahun pelaksanaan RENJA) | Target Capaian kinerja dan Realisasi RENTRA s/d tahun 2022 (%) | | | |
|---|--------|---|--|----------------|---|--|---|----------------|--|----------------------------------|----------------|-------------|------------------|---|--|--|--|-------------|---|---|
| NOMENKLATUR KEPMEN 050 - J708 TAHUN 2020 | | | | | | | K | RP | | K | RP | K | RP | K | RP | | | | | |
| URUSAN | BIDANG | URUSAN | KEGIATAN / SUB KEGIATAN | M | | | K | SUB KEGIATAN | KEGIATAN | K | RP | K | RP | K | RP | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 9+10+13+12 | 14 = 13/5x100% | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/6 x 100% | 17 | | | | | | |
| 2 | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 100 | 31,586,635,500 | 100 | 18,211,928,065 | 100 | 13,732,520,000 | 50 | 61,217,800 | 1,715,098,958 | 40 | 1,770,386,700 | 1 | + | 150 | 19,980,244,823 | 2 | 1 | |
| 2 | 00 | Urusan Pemerintahan Warga Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelajaran Dasar | Terlaksananya Perilaku dan Administrasi | 100 | | 5,475,698,697 | 100 | 3,815,520,000 | 50 | 61,217,800 | 1,425,003,958 | 40 | 1,886,225,700 | 1 | + | 150 | 6,761,928,455 | 2 | + | |
| 2 | 00 | Urusan Pemerintahan Warga Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelajaran Dasar | Tersedianya Surat Pengantar dan Capaian Kinerja dan Keuangan (Dok) | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 1 | 20,000,000 | 1 | + | 1 | 410,042,000 | 1 | + | |
| 2 | 00 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Percentase Kurang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 20 | 1,519,596,500 | 20 | 243,331,100 | 20 | 285,000,000 | | | | | | | | 20 | 243,331,100 | 1 | + |
| 2 | 00 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang Terdaftar | 10 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 00 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | | 95 | | 95 | | | | | | |
| 2 | 00 | 2.01 | Pembogaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaran Kewenangan Kabupaten Kota | | | 1,034,596,500 | | 243,331,100 | | 72,000,000 | | | | | | | | 243,331,100 | | |
| 2 | 00 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan PUG Kewenangan kab/kota | Jumlah Pengguna Keterbukaan Informasi Publik | 75 | 771,690,500 | 15 | 213,331,100 | 16 | 35,000,000 | 7 | 10,000,000 | 7 | + | 15 | 213,331,100 | 0 | 0 |



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 2 EVALUASI BIENNA TRIWULAN II

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|-----|----------------|----|-------------|---------------|------------|-------------|----|------------|---|------------|-------------|---|------------|--|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 04 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | Jumlah peserta remiliaisasi(roring) | 750 | 250.000.000 | | | 150 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasai Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota | | | | | | 485.000.000 | | | | | | | 213.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkahan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Kritisik Bantuan Mengapresiasi serta Bagi perempuan dalam mengelola | 48 | 485.000.000 | | | | 16 | 175.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Hard Copy Perempuan | | | | | 1.010.000.000 | | | | | | 5 | 35.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | | | Program Perlindungan Perempuan | Persepsi Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak | 20 | 200.000.000 | 20 | | | 1 | 82.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Penegakan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah | | | | | 1 | 200.000.000 | | | | | 1 | 82.000.000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota | Advised PERIOD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Perda) | 1 | 200.000.000 | | | | 1 | 82.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 05 | | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Jumlah Perempuan yang dilakukan | 19 | 189.000.000 | 1 | 18.941.700 | 125 | 41.500.000 | | | | | 1 | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Keterbagian Data di Tingkat Daerah Kab/Kota | | | | | 19 | 189.000.000 | 1 | 18.941.700 | 1 | 41.500.000 | | | | 1 | 20.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | Penyelidikan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota | Fasilitasi Sosialisasi dan Pelatihan rutin perbaikan dan peningkatan Kekerasan terhadap Perempuan dulu | 19 | 189.000.000.00 | 1 | 18.941.700 | 1 | 41.500.000 | | | | | 1 | 20.000.000 | | | | 1 | 20.000.000 | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 06 | | | Program Penerwuhkan Hak Anak (PHA) | Jumlah Lembaga Anak yang terbiasa (Lembaga) | 95 | 2.625.000.000 | 24 | 127.769.200 | 19 | 30.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | | Pelimbagan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha | | | | | 95 | 2.625.000.000 | 24 | 127.769.200 | 19 | 30.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |



LAMPIRAN 2 EVALUASI RENCANA TRIWULAN II

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|----|------|----|---|--|-----|----------------|----|----------------|-----|---------------|---|------------|---|---------------|----|---------------|--|----|---------------|-------------|---|----|---------------|---|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sanktuanan Pemeliharaan Pemerintahan Huk. Anak Kewenangan Kab/Kota | Jumlah Persemaian yang dibersihkan (Jumlah) | 05 | 2.625.000.000 | 24 | 127.769.200 | 19 | 36.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | | | | Urusan Penyelehan Bantang Pengendalian Pestisida dan Keharmonisan Berurusan | Catatan PTS/Persamaian yang diolah (%) | 100 | 27.053.039.000 | 60 | 12.346.187.348 | 180 | 9.479.200.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Catatan Akhir Baru (%) | 100 | | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah PTS/Rengas yang diolah (PTS) | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | | | Program Pengembang Urusan Penyelehan Daerah Kab/Kota | | | | | 5.475.698.697 | | 3.815.520.000 | 5 | 61.217.000 | 1 | 1.425.000.000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.01 | | Perekonomian, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 4 | 265.000.000 | 18 | 83.821.000 | 7 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Catatan Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan catatan kinerja, realisasi kerangka dan laporan tahunan (Dokumen) | 4 | 265.000.000 | 18 | 83.821.000 | 7 | 30.000.000 | 5 | 30.000.000 | | | | | | | | 122.177.000 | | | | | |
| 2 | 14 | 02 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 191.236.000 | | 158.556.000 | | 2.172.520.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Federasi/ Prakaryawan Gaji dan Tunjangan | 60 | | | | 14 | 2.129.000.000 | | | | | 25 | 1.068.457.723 | | 20 | 1.068.457.723 | 2 | 0 | 20 | 1.068.457.723 | 0 | 0.000.000 |
| 2 | 14 | 01 | 2.02 | 02 | Pelaksanaan Peninjauan dan Pengujian/Verifikasi Komponen SKPD | Jumlah Peninjauan Jasa administrasi propylene keuangan (uang) | 7 | 191.236.000 | 7 | 158.556.000 | 12 | 43.520.000 | | | | | | | | | | | | | 0.000.000 | | 0 |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 1.991.051.472 | | 726.679.000 | | 200.500.000 | | 22.667.000 | | 16.700.000 | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2.06 | 02 | | | Penyediaan Perlakuan dan Pengelolahan Kantor | Jumlah Perlakuan gedung kantor yang berdokumen surat | | | | | 5 | 50.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah Perlakuan gedung kantor genoa | | 200.000.000 | | | 5 | 43.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |



LAMPIRAN 2 EVALUASI KINERJA TRIWULAN II

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---|---------|---------------|---------|---------------|-------|---------------|-------|------------|-----|---------------|--|---------------|--|---------------|--|----|------------|-------------|---|-----|---------------|---------------|---|---|--|
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 04 | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Atas Kebutuhan (item) | 78 | 27.881.275 | 226 | 99.603.000 | 20 | 1.500.000 | 15 | 14.757.800 | | | | | | | | 15 | 18.777.800 | 1 | 1 | 241 | 114.366.000 | 1 | 4 | | |
| | | | | | | | Jumlah Atas Tulus Kantor | 237 | 296.829.836 | 150 | | 32 | 28.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 05 | | Penyediakan Bantuan dan Pengamanan | Jumlah Jenis Bantuan Cetakan dan Pengamanan Bencana | 601.467 | 180.440.000 | 223.455 | 70.168.900 | 4.000 | 14.000.000 | 7.750 | 3.100.000 | - | | | | | | | | 7.750 | 3.100.000 | 2 | 4 | 278.000 | 78.238.000 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 06 | | Penilaian Kunjungan Tamu | Jumlah Akibatan dan Akhiran Kantor (peserta) | 8.133 | 242.263.550 | 895 | 46.620.200 | 240 | 15.000.000 | - | - | 275 | 16.500.000 | | | | | | | 275 | 16.500.000 | 0 | 3 | 2.279 | 40.429.200 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.06 | 09 | | Penyelemparan Rapat Koordinasi dan Koordinasi SKPM | Jumlah rapat koordinasi dan koordinasi plus | 422 | 1.450.466.647 | 176 | 501.286.900 | 40 | 52.000.000 | 2 | 4.000.000 | - | | | | | | | 2 | 4.000.000 | 0 | 0 | 278 | 1.960.556.000 | 0 | 0 | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | | | Penyediaan Jasa Penganguran Ormas Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | 4.893.053.000 | | 4.165.318.575 | | 1.342.500.000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 01 | | Penyediaan Jasa Sosial Masyarakat | Tersedianya pelayanan jasa sosial masyarakat (halan) | 2.417 | 14.000.000 | 186 | 4.549.926 | 120 | 1.100.000 | - | - | 4 | 500.000 | | | | | | | 4 | 500.000 | 0 | 0 | 120 | 2.000.000 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah halan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (halan) | 12 | 256.000.000 | 12 | 102.168.649 | 12 | 50.000.000 | - | - | 8 | 12.000.000 | | | | | | | 8 | 12.000.000 | 0 | 0 | 17 | 1.134.000.000 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 01 | 2.08 | 04 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tersedianya pembelahan dan sebagian perkantoran (sarang) | 75 | 4.623.053.000 | 93 | 4.053.500.000 | 93 | 1.203.400.000 | - | - | 93 | 372.000.000 | | | | | | | 93 | 372.000.000 | 0 | 0 | 100 | 4.420.000.000 | 0 | 0 | |



LAMPIRAN 2 EVALUASI RENJA TRIMESTER II

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|--|-------------|----------------|-------------|-----|----------------|--|--------|---------------|--|---|------------|----|-------------|--|--|------------|-------------|------------|---|---|
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 4 | Pembelian Barang MBB Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 997.606.000 | | 347.424.034 | | 7.000.000 | | 1 | 22.442.124 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 02 | Pembelian Jasa Penitahanan, Biaya Penitahanan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Pembelian barang/layanan kendaraan dinas/operasional (juta) | | 4 | 325.000.000 | | 4 | 161.897.984 | | 4 | 15.000.000 | | 1 | 22.442.125 | | | | | 22.442.125 | 0 | 1 | | |
| | | | | | | Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang diperlukan (jumlah) | | 4 | 74.000.000 | | | | | 5 | 45.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 09 | Pembelian/Rahasia Serta dan Penunjang Gedung Kantor dan Rapuan Lantai | Pelaksanaan perbaikan rumah/pendekatan gedung kantor (butuh) | | 12 | 30.000.000 | | 12 | 18.534.000 | | 1 | 5.000.000 | | | | | | | | | 12 | 18.534.000 | 0 | 2 |
| | | | | | | Jumlah Gedung kantor yang dibangun | | 1 | 450.000.000 | | 1 | 195.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 01 | 2.09 | 10 | Pembelian/Rahasia Serta dan Penunjang Gedung Kantor dan Rapuan Lantai | Telah dilaksanakan Pembelian rumah/pendekatan perbaikan gedung kantor (jumlah) | | 3 | 67.606.000 | | | | | 3 | 5.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | | | Program Penumbuhan Keharmonisan Berkeluarga (PKB) | Cukupan PTKI Peserta KB Akhir (%) | | 100 | 26.591.039.000 | | 100 | 13.021.793.368 | | 100 | 9.317.000.000 | | | | 77 | 278.095.000 | | | | | | | |
| | | | | | | Cukupan Akseptor Baru (%) | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Jumlah PTK Remaja yang Akhir (PTK) | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | | Pengembangan Tempat Praktik KB/Praktek Lapangan KB (PKB+PLKB) | | | 90 | 145.000.000 | | 130 | 40.085.000 | | 76 | 42.500.000 | | | | 72 | 28.400.000 | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 01 | Pengembangan Pelatihan, Pengabdian, Pelayanan dan Pengembangan Program KAHKP untuk Pengembangan Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB+PLKB) | Jumlah PPKRD dan Sub PPKRD yang diidentifikasi (jumlah) | | 90 | 145.000.000 | | 130 | 40.085.000 | | 76 | 42.500.000 | | | | 72 | 28.400.000 | | | 72 | 28.400.000 | 0 | 0 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | | Pengembangan dan Pendidikan Karakteristik Anak dan Olah Konservasi serta Pendidikan dan Pelayanan KB di Lingkungan Keluarga dan Jaringannya | Jumlah jenis Anak karakteristik yang diidentifikasi (Jenis) | | 1318 | 25.460.039.000 | | 68 | 11.332.917.348 | | 16.178 | 9.322.500.000 | | | | 5 | 241.645.000 | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | Pengembangan Penerapan dan Pengembangan Pendekatan dan Pendekatan Pendekatan Pendidikan dan Penerapan KB di Lingkungan Keluarga dan Jaringannya | Jumlah jenis Anak karakteristik yang diidentifikasi (Jenis) | | 5 | 24.500.000.000 | | 5 | 11.181.964.368 | | 5 | 9.350.000.000 | | | | 5 | 241.645.000 | | | 5 | 241.645.000 | 1 | 0 | |

LAMPIRAN 2.I EVALUASI RENJA TRIWULAN II

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|-------|---------------|----|-------------|----|---|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 06 | | Peningkatan Sosial Penganggaran KB | Kemandirian orangtua absorber pendamping an keluarga miskin (unit Rende 2) | | 9.749.461.000 | | | | | 30 | 2.154.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah KK KB yang diadakan (unit) | | | | | | | 231 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah KK yang tidak yang diadakan (unit) | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah sementara pramama SP36/Perser ai komputer yang diadakan (unit) | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 06 | | Pembinaan Pelajaran Keluarga Baru dan Kehamilan Reproduksi di Familia Kehamilan Termaula, Jaringan dan Jaringannya | Jumlah peserta konseling KB (orang) | 1.250 | 441.739.000 | | | | | 16.110 | 20.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah peserta konseling KB (orang) | | 247.103.000 | | | | | | 25.000.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Remaja yang ditiba (orang) | | | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 10 | | Dukungan Operasional Pelajaran KB Terjaring | Jumlah klinik yang terdapat dalam dukungan operasional (klinik) | 43 | 510.300.000 | 63 | 150.953.000 | 63 | | 32.940.000 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Dingkat Distrik Kab/kota dalam Pelayanan dan Pembinaan Kehamilan Ber-KB | | | | 906.000.000 | | 39.355.200 | | | 52.000.000 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 03 | 2.01 | 11 | | Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Masa Kepa Lainnya dalam Pelayanan Pelajaran dan Pembinaan Kehamilan Ber-KB | Jumlah Laporan evaluasi teknis dan PPMT/pelaksanaan perminuman masarakat dalam berjalan (dokumen) | 1 | 336.000.000 | | | | 1 | 12.000.000 | | | | | | | | | | | | |



LAMPIRAN 2 EVALUASI RENJA TRIWulan II

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|----|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|-------------|---|---|--|--|--|--|
| 2 | 14 | 03 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan dan Pengembangan Program KKINPK di Komunitas KB | Jumlah Komunitas KB yang dilibatkan (Dua) | 38 | 650.000.000 | 9 | 39.555.200 | 6 | 5 | 60.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 04 | | | Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera (KS) | Jumlah Terangsi Pendamping Plus Keluarga yang Dilibatkan (Orang) | | 80 | 462.000.000 | 61 | 324.395.000 | 60 | 161.200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga sejati melalui Pembiayaan Ketransformasi dan Keberjayaan Keluarga | | | 80 | 462.000.000 | 61 | 324.395.000 | 61 | 161.200.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 | Orientasi pelatihan teknis pelaku usaha/kader ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKA, HKR, IWL, PPPKS, PN-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEKK)) | Jumlah Terangsi Pendamping Plus Keluarga yang dilibatkan atau dilibatkan (orang) | | 566.901.000 | | | 60 | 30.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Fokus orientasi dan sasaran hasil | | | | | 1 | 22.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 05 | Penerapan Sistem Operasional bagi Pengelola dan Pelakuans (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKA, HKR, PPPKS, PN-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (PEKK)) | Jumlah PLCP yang mendapat dilengkapi operasional (PLCO) | | 80 | 462.000.000 | 61 | 324.395.000 | 61 | 169.200.000 | | | | | | | | | | 48 | 100.000.000 | 2 | 2 | | | | |

Lampiran 3
Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Kabupaten Flores Timur

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 | | | | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-) | SUMBER DANA | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|--------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | | | | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 2 | | | | | Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | |
| 2-08 | 2-14 | 0-0 | 01 | | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | 13,712,520,000 | | | | 11,676,123,785 | | | | (2,036,396,215) | |
| x | xx | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | | | 3,795,520,000 | | | 3,459,242,120 | | | | (336,277,880) | |
| x | xx | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Pelayanan administrasi perkantoran (%) | 100 | 3,795,520,000 | | 100 | 3,459,242,120 | | | | (336,277,880) | |
| | | | | | | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | | | 100 | | | | | | |
| | | | | | | Tersedianya Laporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan (dokumen) | 7 | | | 7 | | | | | | |
| x | xx | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 30,000,000 | | | 59,200,000 | | | | 29,200,000 | |
| x | xx | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan capaian kinerja, realisasi keuangan dan laporan tahunan (Dokumen) | 7 | 30,000,000 | Larantuka (OPD) | 5 | 59,200,000 | Larantuka (OPD) | | 29,200,000 | APBD II (DAU) | |
| x | xx | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 2,172,520,000 | | | 2,255,419,400 | | | | 82,899,400 | |
| x | xx | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Frekuensi pembayaran gaji dan tunjangan (kali) | 14 | 2,129,000,000 | Larantuka (OPD) | 14 | 2,205,619,400 | Larantuka (OPD) | | 76,619,400 | APBD II (DAU) | |
| x | xx | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Penerima Jasa administrasi pengelola keuangan (Bulan) | 12 | 43,520,000 | Larantuka (OPD) | 12 | 49,800,000 | Larantuka (OPD) | | 6,280,000 | APBD II (DAU) | |
| x | xx | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur | | 180,500,000 | | | 135,865,000 | | | | (44,635,000) | APBD II (DAU) |
| x | xx | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (jenis) | 5 | 40,000,000 | Larantuka (OPD) | 0 | 0 | Larantuka (OPD) | | (40,000,000) | APBD II (DAU) | |

| URUSAN | KODE URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 | | | | | | BERTAMBAH/ BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-) | SUMBER DANA | | |
|--------|----------------|---------------|---------|---|---|---|---|--|--------------------------|--------|-------------------|--------------------------|--------|--|----------------|------------------|--|
| | | | | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | | | |
| | | | | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | | | | |
| | | | | | | | | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | | | | Jumlah peralatan gedung kantor (jenis) | 3 | 25,000,000 | | 0 | 0 | | | | (25,000,000) | | |
| X | XX | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Alat Kebersihan yang disediakan (jenis) | 20 | 4,500,000 | Larantuka (OPD) | 20 | 4,502,700 | Larantuka (OPD) | | | 2,700 | APBD II (DAU) | |
| X | XX | 01 | 2.06 | 05 | | Jumlah Jenis ATK yang disediakan (jenis) | 32 | 28,000,000 | | 32 | 25,497,300 | | | | (2,502,700) | | |
| X | XX | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan (lembar) | 40000 | 16,000,000 | Larantuka (OPD) | 4,000 | 15,000,000 | Larantuka (OPD) | | | (1,000,000) | APBD II (DAU) | |
| X | XX | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Makanan dan Minuman Kantor (dos) | 250 | 15,000,000 | Larantuka (OPD) | 500 | 30,000,000 | Larantuka (OPD) | | | 15,000,000 | APBD II (DAU) | |
| X | XX | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi (kali) | 40 | 52,000,000 | Larantuka (OPD) | 24 | 60,865,000 | Larantuka (OPD) | | | 8,865,000 | APBD II (DAU) | |
| X | XX | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 1,342,500,000 | | | | 922,760,000 | | | (419,740,000) | | |
| X | XX | 01 | 2.08 | | | Tersedianya pelayanan Jasa surat menyurat (Lembar) | 120 | 1,100,000 | Larantuka (OPD) | 12 | 1,000,000 | Larantuka (OPD) | | | (100,000) | APBD II (DAU) | |
| X | XX | 01 | 2.08 | | | Jumlah bulan layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) | 12 | 58,000,000 | Larantuka (OPD) | 12 | 28,960,000 | Larantuka (OPD) | | | (29,040,000) | APBD II (DAU) | |
| X | XX | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang) | 93 | 1,283,400,000 | Larantuka (OPD) | 93 | 892,800,000 | Larantuka (OPD) | | | (390,600,000) | APBD II (DAU) | |
| X | XX | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | 70,000,000 | | | | 83,997,720 | | | 15,997,720 | | |
| X | XX | 01 | 2.09 | | | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa perizinan (unit) | 5 | 15,000,000 | Larantuka (OPD) | 5 | 12,000,000 | Larantuka (OPD) | | | (3,000,000) | APBD II (DAU) | |
| X | XX | 01 | 2.09 | | | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara (unit) | 5 | 45,000,000 | | 5 | 67,997,720 | | | | 22,997,720 | | |
| X | XX | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor yang dipelihara/direhab (unit) | 1 | 5,000,000 | Larantuka (OPD) | 1 | 3,000,000 | Larantuka (OPD) | | | (2,000,000) | APBD II (DAU) | |
| X | XX | 01 | 2.09 | 11 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala Perlengkapan gedung kantor (jenis) | 3 | 5,000,000 | Larantuka (OPD) | 3 | 3,000,000 | Larantuka (OPD) | | | (2,000,000) | APBDII (DAU) | |

| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TABEL 1. KINERJA DAI PERUBAHAN | | | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-) | SUMBER DANA | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|--------------------------------|--------------------------|--|-------------------|--------------------------|--|--|------------------|--|--|
| | | | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 2 | 08 | | | | Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | 438,800,000 | | | 160,000,000 | | -278,800,000 | | | |
| 2 | 08 | 02 | | | Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | <i>Percentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%)</i> | 20 | 285,000,000 | | 20 | 85,000,000 | | -200,000,000 | | | |
| | | | | | | <i>Jumlah Lembaga Perempuan dan Anak yang terbina</i> | 19 | | | 19 | | | | | | |
| | | | | | | <i>Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)</i> | 100 | | | 100 | | | | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan | | | 72,000,000 | | | 55,000,000 | | -17,000,000 | | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Penguatan Kelembagaan Anak (Lembaga)</i> | 46 | 35,000,000 | 19 Kecamatan | 16 | 35,000,000 | 19 Kecamatan | 0 | APBD II (DAU) | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.01 | 04 | Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG | <i>Jumlah peserta sosialisasi (orang)</i> | 150 | 37,000,000 | Larantuka-Ibukota Kabupaten | 150 | 20,000,000 | Larantuka-Ibukota Kabupaten | -17,000,000 | APBD II (DAU) | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | 213,000,000 | | | 30,000,000 | | -183,000,000 | APBD II (DAU) | | |
| 2 | 08 | 02 | 2.02 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | <i>Jumlah Kelompok Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (kelompok)</i> | 48 | 178,000,000 | 19 Ke. (Wotan Ulumando: Desa Wotanulumado), (Ile Mandiri: Riangkemic, Tersebar di 3 dusun) (Solor Selatan: Sulengwaseng) (Solor Timur: Desa Motonwutun (Dusun I,II, dan III), Solor Barat: Desa Titehena, Kalelu, Lamawalang, Balaweling I, Desa Balaweling II dan Desa Nusadani) (Larantuka: Pohon Sirih, PTW Bao Lingk. Kampung Tengah dan Lingkungan Lebau), (Solor Barat: Desa Titehena) | 16 | 30,000,000 | 19 Ke. (Wotan Ulumando: Desa Wotanulumado), (Ile Mandiri: Riangkemic, Tersebar di 3 dusun) (Solor Selatan: Sulengwaseng) (Solor Timur: Desa Motonwutun (Dusun I,II, dan III), Solor Barat: Desa Titehena, Kalelu, Lamawalang, Balaweling I, Desa Balaweling II dan Desa Nusadani) (Larantuka: Pohon Sirih, PTW Bao Lingk. Kampung Tengah dan Lingkungan Lebau), (Solor Barat: Desa Titehena) | -148,000,000 | APBD II (DAU) | | |

| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022 | | | | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-) | SUMBER DANA | | | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|--|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|----------------|---|----|----|--|--|--|
| | | | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | | | | Jumlah Hasil Karya Perempuan (jenis) | 5 | 35,000,000 | 19 Kecamatan | 0 | 0 | 19 Kecamatan | -35,000,000 | | | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | | | Program Perlindungan Perempuan | Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani (%) | 20 | 82,000,000 | | 20 | 30,000,000 | | -52,000,000 | | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | 82,000,000 | | | 30,000,000 | | -52,000,000 | | | | | | | |
| 2 | 08 | 03 | 2.01 | 02 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Advokasi dan Layanan Perlindungan Perempuan (Kali) | 1 | 82,000,000 | 19 Kecamatan | 1 | 30,000,000 | 19 Kecamatan | -52,000,000 | APBD II (DAU) | | | | | | |
| 2 | 08 | 05 | | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak | Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang) | 125 | 41,500,000 | | 125 | 20,000,000 | | -21,500,000 | | | | | | | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota | Jumlah Perempuan yang diintervensi (Orang) | | 41,500,000 | | | 20,000,000 | | -21,500,000 | | | | | | | |
| 2 | 08 | 05 | 2.01 | 01 | Penyedian Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | Freskuensi Sosialisasi dan Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan Kekerasan terhadap Perempuan (kali) | 1 | 41,500,000 | Ibukota Kabupaten | 1 | 20,000,000 | Ibukota Kabupaten | -21,500,000 | APBD II (DAU) | | | | | | |
| 2 | 08 | 06 | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Jumlah Lembaga Anak yang terbina (Lembaga) | 19 | 30,300,000 | | 19 | 25,000,000 | | -5,300,000 | APBD II (DAU) | | | | | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga) | | 30,300,000 | | | 25,000,000 | | -5,300,000 | APBD II (DAU) | | | | | | |
| 2 | 08 | 06 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Forum Anak yang dibentuk (forum/lembaga) | 19 | 30,300,000 | 19 Kecamatan | 19 | 25,000,000 | 19 Kecamatan | -5,300,000 | APBD II (DAU) | | | | | | |
| 2 | 14 | | | | Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | 9,478,200,000 | | | | 8,856,881,665 | | -1,421,318,335 | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Cukupan PUS Peserta KB Aktif (%) | 100 | 9,317,000,000 | | 100 | 7,947,681,665 | | -1,369,318,335 | | | | | | | |
| | | | | | | Cukupan Akseptor Baru (%) | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | |

| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | KODE | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | LAKUKAN KETERAMPILAN DAN PENGETAHUAN | | | | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-) | Sumber DANA | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|------|--|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | | | SETELAH PERUBAHAN | | | | | | |
| | | | | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | | | | | | Jumlah PIK Remaja yang Aktif (PIK) | 100 | | | 100 | | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | | | Pendayagunaan Tenaga Penyuluhan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) | | | 42,500,000 | | | | 30,000,000 | | | -12,500,000 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.02 | 03 | | Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diorientasi (orang) | 76 | 42,500,000 | Ibukota Kabupaten | 76 | 30,000,000 | Ibukota Kabupaten | | | -12,500,000 | APBD-18 (DAU) |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | | | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota | Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%) | | 9,222,500,000 | | | | 7,917,681,665 | | | -1,304,818,335 | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 01 | | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Jenis Alat kontrasepsi yang disediakan (jenis) | 5 | 6,950,000,000 | 19 Kecamatan | 5 | 5,502,946,500 | 19 Kecamatan | | | -1,447,053,500 | APBD-18 (DAU) |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 06 | | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Sarana Transportasi dan perlengkapan kebutuhan Gudang obat dan Alkon dan lain-lain kebutuhan yang diadakan (paket): | | 2,175,000,000 | | | | 2,379,096,000 | | | 204,096,000 | APBD-18 (DAU) |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | 30 | | Larantuka (OPD) | 32 | | Larantuka (OPD) | | | | |
| | | | | | | | Jumlah unit sarana Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (unit) kode rek 2.14.04.2.01.02 | 231 | | 19 Kecamatan | 58 | | 19 Kecamatan | | | | |

| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | URUSAN / BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | TARGET KINERJA DAN KEGIATAN PADA TAHUN BANTUAN 2024 | | | | | | | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) ANGGARAN (Rp.) | SIMPANAN DANA | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|----------------------|---|--------|----------------------|--|---|--------------|---------------------------------------|---------------|--|--|
| | | | | | | | SEBELUM PERUBAHAN | | | | | | PERUBAHAN PERBANDINGAN | | | | | |
| | | | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp.) | LOKASI | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp.) | LOKASI | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | | | Jumlah unit sarana Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,BKT,PPPKS,PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi) | 22 | | | Desa/Kel. Boro, Lewolaga, Larantuka, Ritaelang, Titihend, Kalike, Wawadani, Ile, Warwendan, Kota, Singo, | 22 | | | Desa/Kel. Boro, Lewolaga, Larantuka, Ritaelang, Titihend, Kalike, Warwendan, Ile, Warwendan, Kota, Singo, | | | | | |
| | | | | | - jumlah sarana prasarana SIGA/ Personal Komputer yang dihadirkan (unit) | 16 | | | Balan Penyaluh KB Kee, Wulanggitung, Demen Pagong, Solor Barat, Solor Timur, Ado Barat, Ado Timur, Ile Boleng, Adonara, Witihuma, Kelubagolit | 0 | | | Balan Penyaluh KB Kee, Wulanggitung, Demen Pagong, Solor Barat, Solor Timur, Ado Barat, Ado Timur, Ile Boleng, Adonara, Witihuma, Kelubagolit | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Peserta KB yang dibina (orang) | 15800 | 20,000,000 | 19 Kecamatan | 0 | 5,139,165 | 19 Kecamatan | -16,860,835 | APBD-B (DAU) | | | | |
| | | | | | Jumlah peserta konseling KB (orang) | 250 | 25,000,000 | 19 Kecamatan | 0 | 0 | 19 Kecamatan | -25,000,000 | APBD-B (DAU) | | | | | |
| | | | | | Jumlah Remaja yang dibina (orang) | 60 | 20,000,000 | 19 Kecamatan | 0 | 0 | 19 Kecamatan | -20,000,000 | APBD-B (DAU) | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.03 | 11 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak | Jumlah klinik yang mendapat dukungan operasional (Klinik) | 63 | 32,500,000 | 19 Kecamatan | 63 | 32,500,000 | 19 Kecamatan | 0 | APBD-B (DAU) | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertuan Ber-KB | | | 52,000,000 | | | | | -52,000,000 | | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 01 | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertuan Ber-KB | Jumlah Laporan evaluasi tahunan dan PPM (perkiraaan permintaan masyarakat) tahun berjalan (dokumen) | 1 | 12,000,000 | 19 Kecamatan | 0 | 0 | 19 Kecamatan | -12,000,000 | APBD-B (DAU) | | | | |
| 2 | 14 | 03 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB | Jumlah Kampung KB yang dibentuk (Desa) | 5 | 40,000,000 | Desa Ongalereng (Solbar), Desa Kolaka (Tanjung Bunga), Desa Lamalata (Adonara Timur), Desa Kenere (Solsei), Adobala (Klubagolit) | 0 | 0 | Desa Ongalereng (Solbar), Desa Kolaka (Tanjung Bunga), Desa Lamalata (Adonara Timur), Desa Kenere (Solsei), Adobala (Klubagolit) | -40,000,000 | APBD-B (DAU) | | | | |
| 2 | 14 | 04 | | | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina (Orang) | 80 | 161,200,000 | | 80 | 109,200,000 | | -52,000,000 | | | | | |

| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan) | SEBELUM PERUBAHAN | | | SETELAH PERUBAHAN | | | BERTAMBAH (BERKURANG) ANGGARAN (Rp,-) | SUMBER DANA |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | | | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp,-) | LOKASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | | 161,200,000 | | | 109,200,000 | | -52,000,000 | |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 04 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKI, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) | Jumlah Tenaga Pendamping Bina Keluarga yang dibina atau dilatih (orang) | 80 | 30,000,000 | Ibukota Kabupaten | 0 | 0 | Ibukota Kabupaten | -30,000,000 | APBD II (DAU) |
| | | | | | | Frekuensi orientasi dan sarasehan (kali) | 1 | 22,000,000 | Ibukota Kabupaten | 0 | 0 | Ibukota Kabupaten | -22,000,000 | APBD II (DAU) |
| 2 | 14 | 04 | 2.01 | 05 | Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKI, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS | Jumlah PLKB yang mendapat dukungan operasional (PLKB) | 61 | 109,200,000 | 19 Kecamatan | 61 | 109,200,000 | 19 Kecamatan | 0 | APBD II (DAU) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |